

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional secara normatif di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C, dan Pasal 31. Konstitusi tersebut menegaskan bahwa negara berkewajiban menjamin hak warga negara atas pekerjaan yang layak, pendidikan, serta pengembangan diri. Namun demikian, praktik pembangunan sering kali lebih berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik dibandingkan dengan penguatan kapasitas sosial masyarakat. Ketimpangan antara pembangunan fisik dan pembangunan manusia inilah yang kerap menimbulkan berbagai persoalan sosial dalam proses transformasi wilayah.

Rencana pemekaran Kabupaten Bogor Barat yang menempatkan Kecamatan Cigudeg sebagai calon ibu kota administratif merupakan bagian dari strategi pemerataan pembangunan daerah. Secara geografis, Cigudeg memiliki potensi wilayah yang strategis untuk dikembangkan sebagai pusat pemerintahan baru. Perubahan status administratif suatu wilayah tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga merupakan transformasi struktural yang memengaruhi tatanan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat. Perubahan tersebut berpotensi memicu urbanisasi internal, pergeseran mata pencaharian, perubahan distribusi sumber daya, serta masuknya aktor-aktor baru dalam struktur sosial masyarakat.

Perspektif sosiologi pembangunan menjelaskan bahwa perubahan sosial yang berlangsung cepat sering kali menimbulkan ketidakseimbangan antara perubahan struktur sosial dengan kemampuan masyarakat dalam menyesuaikan nilai dan norma yang berlaku. Kondisi ini dapat memunculkan situasi anomie, yaitu melemahnya regulasi norma sosial sehingga individu kehilangan pedoman dalam kehidupan sosial. Menurut Emile Durkheim, anomie muncul ketika perubahan sosial terjadi secara cepat sehingga norma lama tidak lagi berfungsi secara efektif sementara norma baru belum terbentuk secara mapan (Durkheim, 2015, hlm. 243).

Berbagai kajian pembangunan di Indonesia juga menunjukkan bahwa perubahan sosial yang berlangsung cepat dapat memicu disintegrasi sosial ketika sistem nilai dan norma tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan struktur sosial yang baru. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa kondisi tersebut dapat menimbulkan ketegangan sosial dalam masyarakat apabila proses perubahan tidak diikuti dengan penguatan integrasi sosial (Soekanto, 2017, hlm. 305). Modernisasi pembangunan yang ditandai dengan penguatan birokrasi serta rasionalisasi administrasi juga sering membawa konsekuensi sosial yang kompleks. Oleh karena itu, proses pembangunan tidak hanya memerlukan transformasi struktural, tetapi juga penguatan kapasitas sosial masyarakat agar mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi (Soetomo, 2018, hlm. 142).

Proses pembangunan wilayah yang disertai dengan rencana pembentukan pusat pemerintahan baru di Kecamatan Cigudeg sebagai calon ibu kota Bogor Barat berpotensi menimbulkan alienasi sosial apabila masyarakat lokal tidak dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan.

Pembangunan wilayah pada dasarnya tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas manusia sebagai subjek pembangunan. Amartya Sen menjelaskan bahwa pembangunan merupakan proses perluasan kebebasan dan kemampuan (*capabilities*) individu untuk menjalani kehidupan yang bernilai. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi atau pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari meningkatnya kapasitas pendidikan, keterampilan, serta kemampuan adaptasi masyarakat terhadap perubahan sosial (Sen, 2018, hlm. 36). Kesiapan sumber daya manusia menjadi faktor penting agar masyarakat lokal mampu berpartisipasi serta memperoleh manfaat dari proses pembangunan yang berlangsung.

Keberhasilan pembangunan juga dipengaruhi oleh kekuatan relasi sosial yang berkembang di dalam masyarakat. Pierre Bourdieu menjelaskan bahwa modal sosial berupa jaringan, kepercayaan, serta solidaritas sosial merupakan sumber daya kolektif yang memungkinkan masyarakat memperoleh akses terhadap berbagai peluang ekonomi maupun politik (Bourdieu, 2018, hlm. 88). Oleh karena itu, pembangunan wilayah tidak hanya membutuhkan kesiapan infrastruktur dan sistem

birokrasi, tetapi juga penguatan modal sosial masyarakat agar proses perubahan sosial dapat berlangsung secara inklusif dan berkelanjutan.

Kecamatan Cigudeg merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat yang memiliki posisi strategis dalam wacana pemekaran daerah otonomi baru serta perencanaan pembangunan sebagai calon ibu kota Kabupaten Bogor Barat. Sebagai wilayah agraris yang berkembang, karakter dasar wilayah seperti identitas historis, komposisi penduduk, kondisi pendidikan, struktur pekerjaan, serta lanskap geografis menjadi landasan penting dalam merumuskan perencanaan pembangunan wilayah yang tidak hanya efisien secara administratif tetapi juga responsif terhadap kebutuhan sosial masyarakat lokal.

Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor melalui publikasi Kecamatan Cigudeg Dalam Angka 2025 menunjukkan bahwa Kecamatan Cigudeg merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Bogor yang mengalami peningkatan jumlah penduduk dalam beberapa tahun terakhir. Secara keseluruhan, jumlah penduduk Kabupaten Bogor diperkirakan mencapai sekitar enam juta jiwa pada tahun 2025. Persentase penduduk miskin juga tercatat menurun menjadi sekitar 6,25 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Barat dan nasional (Diskominfo Kabupaten Bogor, 2025).

Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui sistem Dapodik 2025 menunjukkan bahwa Kecamatan Cigudeg memiliki lebih dari 100 satuan pendidikan pada jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dengan jumlah peserta didik sekitar 19.838 siswa, terdiri dari sekitar 15.204 siswa SD dan 4.634 siswa SMP. Komposisi tersebut menunjukkan dominasi jumlah sekolah dasar dibandingkan dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pada jenjang pendidikan menengah atas, ketersediaan satuan pendidikan masih relatif terbatas sehingga sebagian lulusan SMP harus melanjutkan pendidikan ke kecamatan lain (Kemendikdasmen, 2025).

Indikator partisipasi pendidikan di Kabupaten Bogor menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7–12 tahun mencapai 99,78 persen dan usia 13–15 tahun sebesar 93,43 persen. Namun angka tersebut menurun cukup signifikan pada kelompok usia 16–18 tahun menjadi 68,38 persen. Penurunan

partisipasi pendidikan pada jenjang menengah atas tersebut menunjukkan masih adanya tantangan dalam pemerataan akses dan keberlanjutan pendidikan, khususnya di wilayah Cigudeg yang berada di kawasan Bogor Barat (BPS Kabupaten Bogor, 2025).

Struktur sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Cigudeg juga dipengaruhi oleh karakteristik mata pencaharian penduduk. Sebagian besar masyarakat bekerja pada sektor pertanian, perdagangan, serta berbagai pekerjaan di sektor informal. Kondisi geografis wilayah yang didominasi oleh lahan pertanian dan perbukitan menyebabkan sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan masih menjadi sumber penghidupan utama masyarakat. Namun demikian, kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Bogor masih menghadapi tantangan dengan tingkat pengangguran terbuka sekitar 7,34 persen atau lebih dari 200 ribu orang.

Karakter geografis wilayah Cigudeg juga memiliki kompleksitas tersendiri. Lanskap wilayah terdiri dari lahan pertanian produktif, kawasan konservasi air tanah, serta jaringan sungai yang cukup kompleks. Penelitian Hasanah dan Pramukanto (2021) mengenai perencanaan lanskap Cigudeg sebagai calon ibu kota Kabupaten Bogor Barat menjelaskan bahwa wilayah ini memiliki lahan sawah dan tegalan yang secara ekologis penting sehingga perlu dilindungi dari alih fungsi lahan yang tidak terkendali. Kondisi curah hujan tinggi, elevasi sekitar 800 meter di atas permukaan laut, serta keberadaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Cisadane, Cidurian, dan Cimanceuri menambah kompleksitas perencanaan wilayah yang harus mempertimbangkan keseimbangan ekologis serta kebutuhan ruang masyarakat.

Seluruh kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan wilayah yang berkaitan dengan pemekaran administratif dan pembangunan pusat pemerintahan baru akan berdampak pada pola interaksi sosial, struktur ekonomi rumah tangga, peluang kerja, serta kapasitas pendidikan masyarakat lokal. Pemahaman yang komprehensif mengenai karakter wilayah menjadi landasan penting untuk merancang strategi pembangunan yang partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan.

Tanpa penguatan modal sosial serta pembangunan sumber daya manusia yang terencana, perubahan wilayah berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial,

marginalisasi masyarakat lokal, serta kegagalan pembangunan jangka panjang. Oleh karena itu, penelitian mengenai **“Modal Sosial Masyarakat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia di Kecamatan Cigudeg Sebagai Calon Ibu Kota Bogor Barat”** menjadi penting untuk menganalisis hubungan antara jaringan sosial, partisipasi masyarakat, perubahan struktur sosial, serta kesiapan kapasitas manusia dalam menghadapi transformasi wilayah. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi strategis bagi pembangunan yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan sesuai dengan amanat konstitusi

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang mengenai pentingnya modal sosial dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia di tengah transformasi wilayah Kecamatan Cigudeg sebagai calon ibu kota Kabupaten Bogor Barat, rumusan masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk modal sosial masyarakat di Kecamatan Cigudeg sebagai calon ibu kota Bogor Barat?
2. Bagaimana peran modal sosial masyarakat dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia di Kecamatan Cigudeg?
3. Apa saja tantangan modal sosial masyarakat dalam pembangunan sumber daya manusia di kecamatan cigudeg sebagai calon ibu kota Bogor Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis bentuk modal sosial masyarakat di Kecamatan Cigudeg sebagai calon ibu kota Bogor Barat yang meliputi habitus, (*cavital*)modal masyarakat dalam arena (*field*).
2. Menganalisis peran modal sosial masyarakat dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia di Kecamatan Cigudeg, khususnya dalam peningkatan kapasitas pengetahuan individu, pendidikan, keterampilan kerja, serta kemampuan adaptasi masyarakat terhadap perubahan sosial.

3. Mengidentifikasi tantangan modal sosial masyarakat dalam menghadapi perubahan sosial akibat perubahan status wilayah, termasuk potensi konflik sosial, ketimpangan akses, melemahnya solidaritas sosial, maupun risiko alienasi sosial.

D. Manfaat Dan Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian sosiologi pembangunan, khususnya dalam menganalisis hubungan antara modal sosial dan pembangunan sumber daya manusia dalam konteks perubahan status wilayah akibat pemekaran daerah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perumusan kebijakan dan strategi pembangunan di Kecamatan Cigudeg sebagai calon ibu kota Kabupaten Bogor Barat. Dengan menggunakan pendekatan teoritis utama dari Pierre Bourdieu, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga diharapkan mampu memberikan arah strategis yang aplikatif. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan strategis bagi pemerintah daerah dalam penyusunan program pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan penguatan sumber daya manusia dan pencegahan risiko disorganisasi sosial.

3. Kegunaan Akademik

Penelitian ini secara akademik diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan modal sosial, perubahan sosial, pembangunan wilayah, serta pembangunan sumber daya manusia. Penelitian ini menawarkan integrasi perspektif teoritis antara pemikiran Pierre Bourdieu mengenai modal sosial dan reproduksi struktur sosial, dengan pemikiran Amartya Sen mengenai pembangunan berbasis kapabilitas, serta Emile Durkheim mengenai integrasi sosial dan risiko anomie. Integrasi perspektif tersebut diharapkan dapat memperkaya pendekatan analisis pembangunan yang selama ini cenderung bersifat sektoral atau berorientasi pada aspek ekonomi semata.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan metodologis dan konseptual bagi studi-studi lain yang mengkaji pemekaran wilayah atau pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), khususnya dalam melihat keterkaitan antara kesiapan sosial masyarakat dan keberhasilan pembangunan daerah.

E. Kerangka Pemikiran

Pembangunan wilayah merupakan suatu proses perubahan sosial yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan penataan wilayah administratif, tetapi juga berkaitan dengan kesiapan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan sosial yang terjadi. Rencana pembentukan Kabupaten Bogor Barat dengan Kecamatan Cigudeg sebagai calon ibu kota menjadi salah satu bentuk transformasi wilayah yang diperkirakan akan membawa perubahan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti peningkatan aktivitas pemerintahan, perkembangan ekonomi, perubahan pola interaksi sosial, serta meningkatnya kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan wilayah tidak hanya ditentukan oleh kesiapan fisik dan kelembagaan, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan sosial masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan.

Dalam perspektif sosiologi pembangunan, masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Salah satu unsur yang menjadi kekuatan masyarakat adalah modal sosial, yaitu sumber daya yang lahir dari hubungan sosial, jaringan, kepercayaan, norma, dan partisipasi masyarakat. Modal sosial memungkinkan masyarakat membangun kerja sama, memperkuat solidaritas, serta meningkatkan kemampuan kolektif dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan Teori Modal Sosial Pierre Bourdieu sebagai landasan utama untuk menganalisis bentuk modal sosial masyarakat di Kecamatan Cigudeg.

Menurut Pierre Bourdieu, modal sosial tidak dapat dipisahkan dari tiga konsep utama, yaitu habitus, modal (*capital*), dan arena (*field*). Habitus menjelaskan nilai, kebiasaan, dan pola perilaku masyarakat yang terbentuk melalui pengalaman sosial. Modal mencakup berbagai sumber daya yang dimiliki masyarakat, baik berupa modal sosial, modal budaya, modal ekonomi, maupun

modal simbolik yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sosial. Sementara itu, arena (*field*) merupakan ruang sosial tempat individu maupun kelompok berinteraksi, bekerja sama, serta mempertahankan kepentingannya melalui berbagai institusi sosial seperti keluarga, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, pemerintah, maupun lembaga keagamaan. Ketiga konsep tersebut digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama mengenai bentuk modal sosial masyarakat di Kecamatan Cigudeg sebagai calon ibu kota Bogor Barat.

Modal sosial yang dimiliki masyarakat selanjutnya dianalisis hubungannya dengan pembangunan sumber daya manusia menggunakan Teori Kapabilitas Amartya Sen. Menurut Sen, pembangunan tidak hanya diukur melalui pertumbuhan ekonomi, tetapi melalui kemampuan (*capability*) masyarakat untuk mengembangkan potensi dirinya. Pendidikan, pengetahuan, keterampilan, kesehatan, serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial menjadi unsur penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam penelitian ini, teori Amartya Sen digunakan untuk menjelaskan bagaimana modal sosial masyarakat mampu mendukung pengembangan kapasitas individu, memperkuat partisipasi masyarakat, serta meningkatkan kesiapan sumber daya manusia dalam menghadapi perubahan wilayah. Perspektif ini menjadi dasar dalam menjawab rumusan masalah kedua mengenai peran modal sosial masyarakat dalam pembangunan sumber daya manusia di Kecamatan Cigudeg.

Di sisi lain, perubahan status Kecamatan Cigudeg sebagai calon ibu kota Bogor Barat juga berpotensi menimbulkan berbagai tantangan sosial. Perubahan yang berlangsung secara cepat dapat memunculkan ketidakseimbangan antara perubahan struktur sosial dengan kemampuan masyarakat dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan tersebut. Untuk menganalisis kondisi tersebut, penelitian ini menggunakan Teori Anomie Emile Durkheim. Durkheim menjelaskan bahwa perubahan sosial yang tidak diikuti dengan penguatan norma dan solidaritas sosial dapat menimbulkan kondisi anomie, yaitu melemahnya integrasi sosial yang ditandai dengan menurunnya kepedulian sosial, melemahnya kepercayaan, meningkatnya individualisme, serta munculnya berbagai bentuk disorganisasi sosial. Dalam konteks penelitian ini, teori anomie digunakan untuk

mengidentifikasi berbagai tantangan modal sosial dalam pembangunan sumber daya manusia, seperti perubahan pola pikir generasi muda, keterbatasan kesempatan pengembangan keterampilan dan lapangan kerja, keterbatasan infrastruktur pendidikan dan ekonomi, serta belum optimalnya sinergi antaraktor pembangunan. Analisis ini menjadi dasar dalam menjawab rumusan masalah ketiga mengenai tantangan modal sosial masyarakat dalam pembangunan sumber daya manusia di Kecamatan Cigudeg.

Berdasarkan ketiga perspektif teoritis tersebut, penelitian ini memandang bahwa modal sosial masyarakat merupakan faktor strategis dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia di Kecamatan Cigudeg. Habitus, modal, dan arena yang dimiliki masyarakat menjadi sumber daya sosial yang dapat meningkatkan kapabilitas individu sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Namun demikian, apabila perubahan sosial akibat pembangunan wilayah tidak diimbangi dengan penguatan modal sosial dan integrasi sosial, maka berpotensi menimbulkan berbagai tantangan yang dapat menghambat pembangunan sumber daya manusia. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu (1) bentuk modal sosial masyarakat, (2) peran modal sosial dalam pembangunan sumber daya manusia, dan (3) tantangan modal sosial dalam pembangunan sumber daya manusia di Kecamatan Cigudeg sebagai calon ibu kota Bogor Barat.

Hubungan antara fenomena penelitian, teori yang digunakan, serta fokus penelitian tersebut disajikan secara sistematis pada Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran Penelitian, yang menggambarkan alur analisis mulai dari fenomena penelitian, konsep modal sosial Pierre Bourdieu, pembangunan sumber daya manusia menurut Amartya Sen, tantangan pembangunan melalui perspektif anomie Emile Durkheim, hingga fokus penelitian yang menjadi dasar dalam menjawab rumusan masalah penelitian.

Table 1.1 Kerangka Pemikiran

Sumber: Diolah oleh peneliti (2026)

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, penelitian ini menempatkan modal sosial masyarakat sebagai faktor utama dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia di Kecamatan Cigudeg. Melalui perspektif Pierre Bourdieu, Amartya Sen, dan Emile Durkheim, penelitian ini menganalisis bentuk modal sosial, perannya dalam pembangunan sumber daya manusia, serta berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat sebagai calon ibu kota Bogor Barat.